Jurnal JAPS
Volume 7, Nomor 2
Agustus 2026
P-ISSN: 2722-161X
E-ISSN: 2722-1601
DOI: 10.46730/japs.v7i2.598

Mobilisasi Partai Politik dalam Partisipasi Pemilih Perkotaan pada Pemilihan Gubernur Jambi 2024

Muhammad Azhari Ramadhan[1], Sahruddin Lubis[2], Zakly Hanafi Ahmad[3]
Universitas Nasional[1,2]
Universitas Jambi[3]
Email: mhmmdazharirmdhn@gmail.com

Kata kunci
Mobilisasi Politik; Masyarakat Perkotaan; Partisipasi Pemilih; Pilkada

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menjelaskan rendahnya partisipasi pemilih perkotaan pada Pemilihan Gubernur Jambi 2024 dengan berfokus pada peran mobilisasi partai politik. Berbeda dari kajian sebelumnya yang dominan menyoroti faktor internal seperti apatisme atau sosial-ekonomi, studi ini menekankan pentingnya komunikasi, kedekatan, dan kepercayaan publik yang dibangun partai. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai politik Kota Jambi, tim pemenangan, dan masyarakat setempat, serta diperkuat oleh studi literatur. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi bukan sekadar dipicu oleh apatisme warga. Faktor penentu utama adalah pola mobilisasi partai yang bersifat jangka pendek, kurangnya komunikasi politik yang dialogis, serta lemahnya relasi antara partai dan masyarakat. Pemilih perkotaan yang cenderung rasional memilih menjaga jarak saat penawaran politik dinilai kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi politik perkotaan sangat bergantung pada mobilisasi berkelanjutan, komunikasi substantif, dan kepercayaan publik. Temuan ini memperkuat posisi partai politik sebagai variabel kunci dalam kajian partisipasi politik local.

Keywords
Local Elections; Political Mobilization; Urban Society; Voter Participation

Abstract
This study aims to explain the low urban voter turnout in the 2024 Jambi Gubernatorial Election by focusing on political party mobilization. Unlike previous research that predominantly highlights internal factors like apathy or socioeconomic status, this study emphasizes political parties' role in building trust, proximity, and public communication. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews with political party officials in Jambi City, campaign teams, and local residents, complemented by relevant literature. The data were analyzed thematically through data reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings indicate that low turnout cannot be attributed solely to citizen apathy. Key drivers include short-term mobilization patterns, non-dialogic political communication, and weak party-voter relations. Rational urban voters tend to distance themselves when political offerings fail to address their actual needs. Ultimately, this study confirms that urban voter participation relies heavily on sustainable mobilization, substantive communication, and public trust, reinforcing the position of political parties as key variables in local political participation studies

Pendahuluan

Partisipasi politik masyarakat adalah salah satu tanda penting dalam menilai bagaimana baiknya sebuah demokrasi, terutama dalam sistem demokrasi pemilu di tingkat daerah. Dari sudut pandang ilmu politik, partisipasi politik tidak hanya diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam memberikan suara pada pemilu, tetapi juga menunjukkan cara hubungan antara warga negara dengan sistem politik yang berlangsung di sebuah negara (Budiardjo, 2008). Oleh karena itu, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan demokrasi lokal sekaligus sebagai bentuk legitimasi terhadap pemerintahan yang terpilih.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih secara nasional menunjukkan kecenderungan yang belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tercatat sekitar 71 persen, dengan rincian partisipasi pada Pemilihan Gubernur sebesar 71,49 persen, Pemilihan Bupati 74,41 persen, dan Pemilihan Wali Kota 67,74 persen (Muliawati, 2025). Angka tersebut masih berada di bawah tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden 2024 yang mencapai lebih dari 80 persen. Selain itu, tingkat partisipasi Pilkada 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 76,09 persen (Mantelean & Santosa, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik lokal masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan dinamika politik lokal maupun hubungan masyarakat dengan proses politik itu sendiri.

Penurunan tersebut semakin mengukuhkan temuan penelitian akademik yang mengidentifikasi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 sebagai indikasi masalah dalam demokrasi lokal, khususnya akibat kurangnya daya tarik kontestasi politik serta ketidakmampuan aktor politik dalam menyajikan calon kepala daerah yang selaras dengan aspirasi masyarakat (Haardiyanti, 2025). Fenomena partisipasi pemilih yang rendah pada Pilkada 2024 tidak hanya menurunkan legitimasi pemerintah daerah yang terpilih, tetapi juga beresiko merusak kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan.

Pada tingkat daerah, pelaksanaan Pilkada 2024 di Provinsi Jambi menyajikan dinamika partisipasi pemilih yang layak untuk dianalisis secara mendalam. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2024 mencapai 72,76 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menandakan peningkatan dibandingkan Pilgub 2020 sebesar 67,90 persen (Faizarman, 2024). Kenaikan ini mencerminkan kemajuan partisipasi secara keseluruhan di skala provinsi. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah target partisipasi nasional yang ditetapkan KPU, yakni 82 persen.

Pilkada tahun 2024 di Kota Jambi mencakup dua kontestasi politik utama, yaitu Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwako). Pilgub Jambi 2024 dimenangkan pasangan Haris-Sani yang meraih 61,01 persen dan pasangan Romi-Sudirman hanya meraih 38,99 persen suara (Almunanda, 2024). Terdapat sebuah fenomena yang menarik pada Pilgub Jambi 2024 yang menunjukkan Kota Jambi memiliki tingkat partisipasi terendah dibandingkan wilayah kabupaten/kota lainnya. Distribusi partisipasi pemilih di berbagai kabupaten/kota Provinsi Jambi pada Pilkada

2024 mengungkapkan disparitas yang cukup mencolok. Wilayah seperti Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhasil mencatat partisipasi di atas 79 persen, sementara Kota Jambi tercatat sebagai daerah dengan partisipasi terendah. Hal ini menjadikan perhatian khusus mengingat Kota Jambi, sebagai pusat administrasi dan kegiatan ekonomi provinsi, memiliki akses informasi, infrastruktur, serta modal sosial yang relatif superior dibandingkan kebupaten-kabupaten lain. Untuk mengilustrasikan perbandingan tingkat partisipasi antarwilayah di Provinsi Jambi pada Pilkada 2024, data disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1
Daftar DPT dan Tingkat Partisipasi Pilgub 2024 di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
1.	Kota Jambi	457.351	284.070	62,10
2.	Kab. Muaro Jambi	317.746	237.763	74,82
3.	Kab. Batanghari	218.007	152.145	69,79
4.	Kab.Tanjung Jabung Barat	236.997	170.249	71,86
5.	Kab. Tanjung Jabung Timur	174.860	141.862	81,11
6.	Kab. Bungo	235.991	174.325	73,87
7.	Kab. Tebo	263.667	182.257	69,13
8.	Kab. Sorolangun	214.042	165.596	77,36
9.	Kab. Merangin	208.854	147.938	70,85
10.	Kab. Kerinci	173.605	138.004	79,49
11.	Kota Sungai Penuh	72.734	57.649	79,26

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Berdassarkan dari Tabel I, data menunjukan bahwa Kota Jambi memilki jumlah DPT terbesar di Provinsi Jambi, yakni 457.351 pemilih, namun tingkat partisipasinya tercatat paling rendah, yakni sekitar 62,1 persen. Di sisi lain, wilayah seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh mencapai tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi, bahkan mendekati atau melebihi 79 persen. Variasi tersebut mencerminkan perbedaan pola perilaku politik antarwilayah di Provinsi Jambi. Secara teoritis daerah perkotaan dengan akses informasi politik yang lebih melimpah, tingkat pendidikan yang relatif superior, serta infrastruktur komunikasi yang lebih memadai diharapkan menunjukkan partisipasi politik yang lebih tinggi. Namun, temuan empiris ini justru mengungkapkan kondisi paradoksal, di mana wilayah perkotaan seperti Kota Jambi malah memiliki partisiapsi lebih rendah daripada wilayah lainnya. Fenomena ini menandakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya ditentukan oleh faktor akses informasi atau skala pemilih, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika interaksi aktor politik dan masyarakat dalam mekanisme mobilisasi politik.

Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam, analisis perlu dilakukan pada tingkat wilayah yang lebih spesifik. Analisis pada tingkat kota secara

agregat belum mampu menggambarkan variasi perilaku politik masyarakat secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan tingkat partisipasi pemilih pada tingkat kecamatan guna mengetahui distribusi partisipasi politik di dalam wilayah Kota Jambi. Data mengenai jumlah DPT, pengguna hak pilih, serta tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub 2024 di setiap kecamatan di Kota Jambi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Daftar DPT dan Tingkat Partisipasi Pilgub 2024 di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
1.	Alam Barajo	81.057	47.603	58,73
2.	Danau Sipin	30.886	19.536	62,25
3.	Danau Teluk	9.726	7.240	74,44
4.	Jambi Selatan	42.036	26.342	62,67
5.	Jambi Timur	48.651	31.317	64,37
6.	Jelutung	43.999	26.838	61,00
7.	Kota Baru	63.350	38.441	60,68
8.	Pal Merah	79.649	48.286	60,62
9.	Pasar Jambi	8.295	5.017	60,48
10.	Pelayangan	9.614	7.182	74,70
11.	Tenalai Pura	40.118	25.868	64,48

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Berdasarkan Tabel II, tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub 2024 di Kota Jambi menunjukkan perbedaan yang cukup besar antar kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Pelayangan dan Danau Teluk memiliki tingkat partisipasi cukup tinggi, sementara kecamatan lain seperti Alam Barajo, Kota Baru, dan Pal Merah menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah. Variasi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di wilayah perkotaan tidak sama di setiap wilayah, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang berbeda di setiap wilayah.

Perbedaan tingkat partisipasi pemilih antarwilayah di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak selalu ditentukan oleh besarnya jumlah pemilih maupun ketersediaan akses informasi politik. Kota Jambi yang memiliki jumlah pemilih terbesar justru menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif rendah dibandingkan beberapa daerah lain. Perbedaan tersebut juga menunjukkan bahwa cara partai politik membangun hubungan dengan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada. Selain memperhatikan aspek distribusi spasial, analisis tentang perkembangan tingkat partisipasi pemilih secara waktu juga sangat penting. Oleh karena itu, tren partisipasi pemilih pada beberapa periode Pilgub di Kota Jambi perlu diteliti lebih lanjut, data tersebut dapat dilihat pada Tabel III.

Tabel 3
Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Tingkat Partisipasi Pemilih Pilgub Tahun 2015, 2020, 2024 di Kota Jambi

No	Tahun Pilgub	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
1.	2015	410.832	280.230	68,21
2.	2020	390.273	239.162	61,28
3.	2024	457.351	284.070	62,10

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Data di Tabel III menunjukkan bahwa jumlah warga yang memilih di Kota Jambi pada tiga periode pemilihan gubernur terakhir mengalami perubahan turun-naik dan belum bisa kembali ke tingkat sebelumnya. Pada pemilihan gubernur 2015, partisipasi mencapai 68,21 persen, lalu turun tajam menjadi 61,28 persen pada pemilihan gubernur 2020, dan naik sedikit lagi menjadi 62,10 persen pada pemilihan gubernur 2024. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak selalu berdampak pada meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Masalah partisipasi pemilih tidak hanya terletak pada aspek administratif pemilu, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antara para aktor politik dan masyarakat dalam proses pemilihan. Dalam kerangka tersebut, efektivitas cara partai politik dalam memobilisasi pendukung, tingkat kekuatan pengenalan politik, serta tingkat hubungan yang baik antara partai dan masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur. Secara teori, partisipasi dalam politik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesadaran tentang politik, kemudahan mendapatkan informasi, dan tingkat pendidikan seseorang (Surbakti, 2010).

Berbagai penelitian tentang partisipasi pemilih pada pilkada telah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia dengan beragam fokus analisis. Misalnya, studi perilaku pemilih dalam Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2024 mengidentifikasi bahwa tingkat partisipasi dipengaruhi oleh rasionalitas pemilih, ikatan emosional dengan kandidat, serta tingkat kepercayaan terhadap partai politik. Kajian tersebut memperkuat argumen bahwa keputusan memilih tidak hanya bergantung pada kesadaran politik, melainkan juga pada persepsi pemilih mengenai kualitas dan kredibilitas partai pengusungnya (Istianah et al., 2025).

Studi lain yang menelaah Pilkada Kota Pangkalpinang 2024 dari sudut pandang sosial dan hukum mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kelemahan pendidikan politik, kurangnya efektivitas komunikasi politik, serta minimnya transparansi dalam proses politik lokal (Zulkifli et al., 2025). Sementara itu, penelitian di Kelurahan Singotrunan mengidentifikasi rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada disebabkan oleh apatisme politik, skeptisme terhadap janji kampanye, serta keterbatasan akses informasi bagi masyarakat (Fauzi & Gumuruh, 2025). Kajian-kajian tersebut secara kelembagaan konsisten menegaskan peran signifikan faktor psikologis, sosial, dan kelembagaan dalam membentuk tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilkada. Khusus di Provinsi Jambi, terdapat sebuah penelitian yang menemukan bahwa

tingginya angka golput pada Pilgub Jambi 2020 dipacu oleh variabel pendidikan, kualitas kandidat, praktik politik uang, sikap apatis masyarakat, keterbatasan informasi, serta aspek teknis penyelenggaraan (HR, 2023). Temuan-temuan ini secara keseluruhan menggarisbawahi bahwa rendahnya partisipasi pemilih merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antarfaktor yang saling terkait.

Penelitian sebelumnya masih cenderung memposisikan masyarakat sebagai aktor utama dalam penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih. Beragam kajian tersebut umumnya menyoroti faktor kesadaran politik, apatisme, kepercayaan terhadap kandidat, serta kondisi sosial-ekonomi sebagai pemicu utama fenomena tersebut. Sebaliknya, peran partai politik sebagai institusi yang secara normatif bertanggung jawab atas fungsi mobilisasi, sosialisasi, pendidikan politik, dan mediasi kepentingan, belum banyak dieksplirasi secara mendalam, terutama dalam konteks masyarakat perkotaan yang ditandai dengan heterogenitas sosial, mobilitas tinggi, serta relasi politik yang relatif cair. Kesenjangan analitis ini menggarisbawahi bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak dapat dipahami secara memadai hanya dari perspektif perilaku masyarakat, melainkan juga memerlukan pemeriksaan terhadap kapabilitas partai politik dalam membangun ikatan, komunikasi, dan kepercayaan politik dengan pemilih. Oleh karenanya, kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap mobilisasi partai politik serta relasi antara partai dan masyarakat perkotaan sebagai elemen inti analisis untuk memahami rendahnya partisipasi pemilih pada Pilgub 2024 di Kota Jambi.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini diformulasikan untuk mengungkapkan bagaimana strategi mobilisasi partai politik serta kualitas relasi antara partai politik dan masyarakat perkotaan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub 2024 di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai bentuk mobilisasi politik yang diterapkan oleh partai, mengidentifikasi bentuk mobilisasi politik yang diterapkan oleh partai politik, mengidentifikasi pola interaksi partai dengan masyarakat, serta menjelaskan hubungan partai politik dan masyarakat terhadap partisipasi pemilih. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian terhadap partisipasi politik lokal dengan memposisikan partai politik tidak sekedar sebagai alat elektoral, melainkan sebagai variabel yang menentukan intensitas keterlibatan masyarakat dalam dinamika demokrasi lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi partai politik, penyelenggara pemilu, serta pejabat daerah guna menyusun strategi partisipasi pemilih yang lebih relevan secara konstekstual, berkelanjutan, dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat Kota Jambi.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus yang mengedepankan fenomena rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilgub Jambi 2024 di Kota Jambi. Metode tersebut ditentukan agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana partai politik melakukan mobilisasi serta interaksi antara partai dan masyarakat dalam hal partisipasi politik (Cresswell, 2016). Kota Jambi ditetapkan sebagai tempat penelitian karena memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

tertinggi di Provinsi Jambi, tetapi menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup rendah. Pada penelitian ini, unit analisis akan berfokus pada tindakan mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik serta masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu seleksi informan yang dilakukan berdasarkan relevansi pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam proses politik yang menjadi fokus studi (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, terdiri dari pengurus partai politik tingkat Kota Jambi yang berperan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Kedua, tim sukses dari pasangan calon yang terlibat langsung dalam proses kontestasi politik. Ketiga, masyarakat Kota Jambi sebagai pemilih, baik yang menggunakan hak suara maupun yang tidak. Terdapat 16 orang sebagai informan dari masyarakat, dengan pengumpulan data dilakukan hingga mencapai titik jenuh informasi.

Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara setengah terstruktur. Pedoman tersebut dirancang berdasarkan fokus penelitian, yang meliputi mobilisasi partai politik, pola komunikasi politik, interaksi antara partai politik dan masyarakat, tingkat kepercayaan politik, serta alasan yang mendasari masyarakat dalam memilih atau tidak menggunakan hak suara. Wawancara mendalam dipilih untuk menggali pengalaman, pandangan, dan penilaian informan dengan lebih mendalam dan kontekstual mengenai dinamika partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 (Meleong, 2019). Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KPU, hasil rekapitulasi Pilkada 2024, dokumen yang berhubungan dengan partai politik, serta literatur akademik yang membahas tentang partisipasi politik, mobilisasi partai, dan perilaku pemilih.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini menggabungkan data empiris dari hasil wawancara dengan pendekatan teoretis mengenai partisipasi politik, mobilisasi politik, serta hubungan antara partai politik dengan masyarakat. Analisis ini fokus pada cara-cara partai politik melakukan mobilisasi politik dan kualitas hubungan antara partai politik dan masyarakat perkotaan membentuk dinamika partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2024. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi tidak hanya dianggap sebagai masalah perilaku individu, tetapi juga disebabkan oleh interaksi antara struktur politik, strategi para aktor politik, dan orientasi masyarakat.

Dinamika Strategi Mobilisasi Partai Politik dalam Pilgub 2024

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mobilisasi politik pada Pilgub Jambi 2024 menunjukkan pola yang cenderung berpusat pada kandidat dan tim pemenangan dibandingkan struktur partai politik itu sendiri. Dalam praktiknya, partai politik lebih berperan sebagai pendukung administratif dan penyedia legitimasi pencalonan, sedangkan aktivitas mobilisasi pemilih lebih banyak dijalankan oleh tim sukses, relawan, dan jaringan informal yang dibentuk selama masa kontestasi politik.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan pengurus dari partai PKB Kota Jambi yang menyatakan bahwa mobilisasi tidak dilakukan langusng oleh partai, lebih banyak melalui tim yang dibentuk dari tim pemenangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Informan yang sama juga menjelaskan bahwa partai tidak memiliki program khusus yang secara spesifik diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih karena aktivitas mobilisasi lebih difokuskan pada kerja tim kandidat. Temuan serupa juga disampaikan oleh pengurus partai Gerindra Kota Jambi yang menyatakan bahwa struktur partai di tingkat kota tidak menerima arahan khusus untuk mengawal pasangan calon yang diusung dalam Pilgub Jambi 2024.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi mobilisasi politik yang secara normatif melekat pada partai politik belum sepenuhnya dijalankan secara langsung oleh organisasi partai. Aktivitas mobilisasi lebih bersifat kandidat sentris dan bergantung pada jaringan tim pemenangan yang dibentuk selama masa pemilu. Konteks tersebut melihatkan bahwa partai politik cenderung berfungsi sebagai kesadaran elektoral dibandingkan sebagai institusi yang secara aktif mengorganisai partisipasi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa mobilisasi politik yang dilakukan cenderung bersifat jangka pendek dan lebih intensif dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Pengurus partai PKB Kota Jambi menjelaskan bahwa mobilisasi umumnya dilakukan menjelang pemilu, sedangkan aktivitas anggota partai di luar masa kampanye lebih banyak berlangsung melalui kegiatan reses anggota legislatif. Hal serupa juga disampaikan oleh pengurus partai Gerindra Kota Jambi yang menyebutkan bahwa sebagian besar kegiatan mobilisasi dilaksanakan dekat dengan berakhirnya masa kampanye.

Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa mobilisasi belum cukup dibangun sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan dalam membentuk keterlibatan politik masyarakat. Aktivitas mobilisasi lebih diarahkan pada kepentingan elektoral jangka pendek utnuk memperoleh dukungan suara pada masa pemilihan. Kondisi ini menyebabkan hubungan politik yang terbentuk antara partai dan masyarakat cenderung bersifat temporer dan tidak berlangsung secara intensif setelah proses pemilu selesai.

Dari sisi strategi, mobilisasi politik pada Pilgub Jambi 2024 dilakukan melalui kombinasi pendekatan langsung dan media digital. Pendekatan tatap muka seperti *door to door*, kegiatan sosial, kampanye terbuka, dan pemanfaatan tokoh masyarakat masih menjadi metode yang cukup dominan dalam menjangkau pemilih. Pengurus partai PPP Kota Jambi menjelaskan bahwa partai melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat serta memanfaatkan kegiatan kampanye terbuka untuk menarik simpatisan, khususnya dari kelompok pemuda.

Selain pendekatan konvensional tersebut, media sosial juga mulai dimanfaatkan secara lebih intensif dalam proses mobilisasi politik. Tim pemenangan pasangan AL Haris-Sani menjelaskan bahwa strategi kampanye difokuskan pada pemilih milenial dan generasi Z melalui media sosial dengan konten yang disesuaikan dengan karakter anak muda. Sementara itu, tim pemenangan pasangan Romi Hariyanto-Sudirman menyatakan

bahwa media sosial dianggap efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara luas, meskipun kampanye langsung tetap diperlukan.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan digital belum mampu sepenuhnya menggantikan pentingnya interaksi langsung. Beberapa informan masyarakat masih menilai bahwa kehadiran langsung partai politik dan aktor politik di lingkungan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kedekatan dan kepercayaan politik. Sebgian besar informan juga menyatakan bahwa partai politik jarang hadir di tengah masyarakat di luar momentum pemilu.

Mobilisasi politik seharusnya menjadi proses yang mampu mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem politik secara berkelanjutan (Huntington & Nelson, 1994). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan mobilisasi politik pada Pilgub Jambi 2024 masih cenderung berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek dan belum sepenuhnya membangun keterlibatan politik masyarakat yang berkelanjutan. Kondisi itu menunjukkan bahwa keberhasilan mobilisasi politik tidak hanya bergantung pada seberapa keras kampanye yang dilakukan saat pemilu, tetapi juga oleh kemampuan partai politik dalam membangun hubungan sosial dan komunikasi politik dengan masyarakat secara terus-menerus dan konsisten.

Hubungan Partai Politik dengan Masyarakat

Hubungan antara partai politik dan masyarakat di Kota Jambi cenderung belum terbangun secara kuat dan berkelanjutan. Interaksi antara partai politik dengan masyarakat umumnya lebih terlihat pada momentum elektoral, sedangkan di luar masa pemilu hubungan tersebut relatif terbatas. Kondisi ini tercermin dari pengalaman beberapa informan masyarakat yang mengaku tidak mengenal pengurus partai politik di lingkungan tempat tinggal mereka serta jarang melakukan aktivitas partai di tengah masyarakat.

Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal pengurus partai di lingkungan sekitar dan tidak pernah melihat kegiatan partai politik di wilayah tempat tinggalnya. Informan lain juga menyebutkan bahwa partai politik hanya aktif menjelang pemilu, sedangkan setelah pemilu selesai, keberadaan partai jarang terlihat kembali di tengah masyarakat.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik dengan masyarakat belum berlangsung secara intensif dan berkelanjutan. Kehadiran partai politik di tingkat lokal cenderung ebrsifat situaisonal dan lebih berorientasi pada kebutuhan elektoral. Dalam beberapa kasus, masyarakat hanya merasakan aktivitas partai ketika masa kampanye berlangsung, baik melalui sosialisasi politik, kampanye langsung, maupun ajakan memilih dari tim pemenangan.

Realitas ini juga di akui oleh pengurus partai politik di Kota Jambi. Pengurus partai Nasdem Kota Jambi menjelaskan bahwa komunikasi partai di tingkat kelurahan dan RT di Kota Jambi tidak terlalu signifikan selama masa kampanye Pilgub karena fokus kampanye lebih diarahkan pada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap strategis. Sementara itu, pengurus partai Gerindra Kota Jambi menyatakan bahwa komunikasi

partai di tingkat akar rumput masih kurang dan kegiatan yang dilakukan banyak bersifat terbuka secara umum dibandingkan komunikasi langsung pada tingkat lingkungan masyarakat.

Meskipun partai politik memiliki struktur organisasi hingga tingkat lokal, keberadaan struktur tersebut belum sepenuhnya aktif dalam membangun hubungan sosial dan komunikasi politik dengan masyarakat secara rutin. Beberapa pengurus partai memang menyebutkan adanya kegiatan non-elektoral seperti kegiatan sosial, pelatihan kader, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Namun, berdasarkan pandangan masyarakat, aktivitas tersebut belum dirasakan secara luas dan belum mampu membangun kedekatan yang kuat antara partai politik dan masyarakat.

Lemahnya hubungan tersebut turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Sebagain informan masyarakat menyatakan bahwa mereka kurang percaya terhadap partai politik karena dianggap hanya hadir ketika membutuhkan dukungan suara masyarakat. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa partai politk belum sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat dan lebih berorientasi pada kepentingan politik sesaat.

Dalam konteks masyarakat perkotaan, kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan politik yang semakin cair dan tidak lagi berbasis keterikatan ideologis yang kuat terhadap partai politik. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki orientasi politik yang lebih rasional dan kritis dalam menilai partai maupun kandidat politik. Akibatnya, kedekatan politik tidak dapat dibangun hanya melalui identitas partai, tetapi juga melalui konsistensi komunikasi, kehadiran sosial, dan kemampuan partai dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Perspektif modal sosial menegaskan bahwa hubungan sosial yang lemah antara partai politik dan masyarakat dapat menghambat terbentuknya kepercayaan politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi (Putnam, 1995). Dalam masyarakat modern keterikatan terhadap partai politik cenderung mengalami penurunan seiring meningkatnya rasionalitas pemilih dan perubahan orientasi politik masyarakat (Dalton, 2008).

Hubungan antara partai politik dan masyarakat di Kota Jambi menunjukkan kecenderungan yang belum sepenuhnya kuat dan berkelanjutan. Keterbatasan komunikasi politik di tingkat lokal, minimnya itneraksi di luar masa kampanye, serta rendahnya kedekatan sosial antara partai dan masyarakat menjadi faktor yang turut memengaruhi lemahnya keteriaktan politik masyarakat terhadap partai politik pada Pilgub Jambi 2024.

Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Pilkada

Penelitian dilapangan mengenai presepsi masyarakat terhadap terhadap Pilgub Jambi 2024 cenderung beragam, namun secara umum memperlihatkan adanya kecenderungan sikap yang lebih kritis dan rasional terhadap proses politik. Sebagian besar masyarakat masih memandang partisipasi dalam pemilihan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi, sementara sebagian lainnya

menunjukkan sikap skeptis terhadap efektivitas politik dalam membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

Beberapa informan yang menggunakan hak pilihnya menyatakan bahwa partisipasi dalam sebuah pemilihan dipandang sebagai kewajiban demokratis sebagai warga negara. Salah satu informan menyebutkan bahwa memilih merupakan bentuk partisipasi langsung dalam demokrasi. Informan lain juga menyatakan bahwa dirinya tetap menggunakan hak pilih untuk menjaga legitimasi pemerintahan dan sebagian bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran normatif terhadap pentingnya partisipasi politik. Partisipasi dalam konteks ini tidak selalu didorong oleh kedekatan dengan partai politik atau kandidat tertentu, melainkan lebih karena kesadaran mengenai hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.

Namun di sisi lain muncul pula pandangan yang lebih pesimis terhadap proses politik dan hasik pemilu. Beberapa orang yang tidak menggunakan hak mereka untuk memilih mengatakan bahwa siapapun yang terpilih dianggap tidak akan mengubah hidup mereka secara besar-besaran. Selain itu, ada juga pandangan bahwa dalam proses politik masih terdapat praktik yang bersifat pragmatis dan tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu.

Sikap skeptis tersebut juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap partai politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pilgub. Sebagian informan masyarakat menilai bahwa partai politik hanya aktif menjelang pemilu dan tidak hadir secara konsisten setelah pemilu selesai. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persepsi bahwa partai politik belum sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat.

Selain faktor kepercayaan, persepsi masyarakat terhadap kandidiat juga memengaruhi sikap politik masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa kandidat yang tersedia dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat atau belum mampu meyakinkan pemilih melalui visi dan program yang ditawarkan. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilih karena merasa tidak memiliki alternatif kandidat yang dianggap representatif.

Penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan sikap pragmatis dalam memandan politik elektoral. Salah satu informan secara langusng menyebutkan bahwa alasan memilih berkaitan dengan praktik *money politics*. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam sebagian kondisi, partisipasi politik tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan programatik atau kualitas kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pragmatis yang berkembang dalam kontestasi politik lokal.

Pada saat yang sama, beberapa informan masyarakat menilai bahwa rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kejenuhan politik dan kekecewaan terhadpa pengalaman politik sebelumnya. Masyarakat merasa bahwa keterlibatan dalam politik belum memberikan perubahan yang nyata terhadap kondisi kehidupan mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya penurunan optimisme masyarakat terhadap efektivitas proses politik lokal.

Dalam perspektif budaya politik, orientasi masyarakat terhadap sistem politik akan memengaruhi tingkat keterlibatan politik masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki orientasi yang cenderung negatif terhadap aktor maupun proses politik, maka kecenderungan untuk berpartisipasi juga dapat mengalami penurunan (Almond & Verba, 1984). Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap institusi politik menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam politik (Newton, 1999).

Persepsi dan sikap masyarakat terhadap Pilgub Jambi 2024 menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari partisipasi yang berbasis loyalitas politik menuju partisipasi yang lebih rasional dan kritis. Dalam konteks masyarakat perkotaan, masyarakat tidak lagi secara otomatis terlibat dalam proses politik, tetapi lebih mempertimbangkan relevansi kandidat, manfaat politik, serta tingkat kepercayaan terhadap aktor dan institusi politik yang terlibat dalam pilkada.

Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2024 di Kota Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dinamika politik maupun dari orientasi masyarakat terhadap proses pemilihan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor apatisme masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya mobilisasi politik, rendahnya kepercayaan terhadap tokoh politik, serta orientasi masyarakat terhadap proses pemilihan.

Beberapa informan juga menyatakan bahwa pengalaman politik sebelumnya memengaruhi sikap masyarakat terhadap pilkada. Sebagian masyarakat merasa bahwa siapapun yang terpiluh tidak akan membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Persepsi tersebut membentuk sikap skeptis dan menurunkan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan mendorong masyarakat untuk memilih tidak menggunakan hak pilih karena menganggap partisipasi politik tidak memberikan manfaat yang nyata.

Faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya pengenalan masyaraka terhadap kandidat maupun proses politik yang berlangsung. Beberapa informan menyatakan bahwa masyarakat kurang mengenal calon yang akan dipilih karena minimnya sosialisasi politik dan keterbatasasn informasi mengenai kandidat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses informasi politik yang tersedia belum sepenuhnya mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pilkada.

Mobilisasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas mobilisasi belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat mengaku jarang menerima sosialisasi politik secara rutin dari partai politik. Aktivitas mobilisasi lebih banyak dilakukan menjelang pemilihan saja melalui tim pemenangan, media sosial, maupun kegiatan kampanye terbuka. Akibatnya, hubungan politik yang terbentuk antara partai dan masyarakat cenderung bersifat temporer dan belum mampu membangun keterikatan politik yang kuat.

Di luar faktor politik, penelitian ini juga menemukan adanya faktor sosial yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat perkotaan. Beberapa informan menyebutkan bahwa kesibukan pekerjaan menyebabkan masyarakat tidak menjadikan partisipasi politik sebagai prioritas utama. Pandangan serupa juga disampaikan oleh pengurus partai yang menilai bahwa karakter masyarakat perkotaan dengan aktivitas pekerjaan yang tinggi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih di Kota Jambi.

Pengaruh praktik politik pragmatis dalam membentuk partisipasi masyarakat. Salah satu informan menyebutkan bahwa alsaan memilih berkaitan dengan praktik *money politics*. Sementara itu, tim pemenangan pasangan calon juga mengakui bahwa kecenderungan masyarakat untuk memilih berdasarkan pemberian material menjadi salah satu tantangan dalam mobilisasi politik. Kondisi tersebut menunjukakan bahwa dalam beberapa situasi, partisipasi politik masih dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis yang bersifat jangka pendek.

Partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sumber daya, mobilisasi, dan motivasi politik (Verba et al., 1995). Dalam konteks Kota Jambi, masyarakat perkotaan sebenarnya memiliki akses informasi dan tingkat pendidikan yang relatif memadai. Namun, lemahnya mobilisasi politik, rendahnya motivasi politik, serta menurunnya kepercayaan terhadap aktor politik menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih.

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2024 di Kota Jambi merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan. Rendahnya kepercayaan politik, lemahnya mobilisasi partai, serta faktor sosial masyarakat perkotaan secara bersama-sama mebentuk kondisi yang kurang mendukung bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dalam penelitian ini, rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub Jambi 2024 di Kota Jambi bukan saja sebagai akibat dari kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap permasalahan politik, melainkan juga memiliki hubungan yang erat dengan dinamika gerakan politik, hubungan antara partai politik dan masyarakat, serta pergeseran pradigma politik masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa upaya mobilisasi politik pada saat Pilkada Jambi 2024 ini cenderung hanya berfokus pada ketokohan calon kandidat, dan tim pemenangannya dari pada melibatkan keanggotaan dari partai politik itu sendiri serta proses politik yang dijalankan juga masih belum berkelanjutan hingga setelah masa pemilihan.

Hubungan antara partai politik dan masyarakat Kota Jambi cenderung kurang signifikan dan tidak terjalin secara intensif diluar masa pemilihan. Banyak masyarakat yang mengaku jarang atau bahkan tidak melakukan komonukasi dengan partai politik, tidak mengenal siapa pengurus dari partai politik yang ada di lingkungan mereka, serta memiliki persepsi bahwa partai politik cenderung hadir menjelang pemilu saja ketimbang

setelah pemilihan selesai. Hal ini menjadi penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat pada partai politik.

Penelitian ini juga menyatakan bahwa masyarakat Kota Jambi memiliki pandangan politik yang lebih rasional. Masyarakat lebih mempertimbangkan untuk memilih atau tidak, karena masyarakat melihat relevansi sang calon, kualitas program yang disajikan, kepercayaan mereka terhadap aktor politik, serta manfaat politik langsung yang mereka alami. Ada juga yang memiliki sikap khwatir terhadap politik akibat dari kekecewaan dari pengalaman politik masyarakat, ketidakpercayaan terhadap para calon, dan penilaian bahwa politik masih gagal untuk membuat perubahan bagi masyarakat.

Bersamaan dengan hal-hal di atas, faktor lain yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi pemilih adalah adanya ketidaksosialisasi politik, kurangnya interaksi politik pada tingkatan masyarakat, sibuknya masyarakat, hingga masih berlangsungnya politik pragmatis dalam konteks politik lokal. Temuan studi ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih akibat hubungan dari berbagai faktor politik dan sosial.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa partisipasi politik masyarakat ditentukan oleh kemampuan dari partai politik dan aktor politik yang merumuskan strategi politik yang mampu menciptakan proses mobilisasi yang terus-menerus, diskusi politik yang bermakna dan juga interaksi sosial-politik yang kuat dengan masyarakat. Di tengah perkembangan masyarakat perkotaan yang semakin rasioanal dan berubah-ubah, meningkatkan partisipasi dari warga dalam pemilihan tidak hanya cukup dengan mobilisasi politik pada saat pemilihan saja, namun juga membutuhkan penyadaran politik dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat.

Referensi

Almond, G., & Verba, S. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara.

Almunanda, F. (2024). *Menang di 10 Daerah, Al haris-Sani Raih 1.092.823 di Pilgub Jambi*. Detik Sumbangsel. https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7677520/menang-di-10-daerah-al-haris-sani-raih-1-092-823-suara-di-pilgub-jambi

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Cresswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.

Dalton, R. J. (2008). Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation. *Political Studies*, *56*, 76–98. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00718.x

Faizarman. (2024). *Partisipasi Pemilih di Pilgub Jambi 2024 Naik 72,76 Persen*. Jambiupdate.Co. https://jambiekspres.disway.id/politik/read/688293/partisipasi-pemilih-di-pilgub-jambi-2024-naik-7276-persen

Fauzi, A. M., & Gumuruh, A. R. (2025). *Studi Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kelurahan Singotrunan Dalam Pilkada Tahun 2024*. *11*(2), 137–142.

Haardiyanti, N. Y. (2025). Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 DAN Aancama Terhadap demokrasi. *Journal of Islam Studies*, *10*(1), 37–44.

HR, M. F. (2023). *Golput dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020*. *11*(2), 288–301. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454

Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta Rineka Cipta.

Istianah, R., Devriansyah, A., Apandi, A. P., Fauziah, A., & Sukabumi, U. M. (2025). *Perilaku Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2024*. *7*, 35–47.

Mantelean, V., & Santosa, B. (2024). *Data Terbaru KPU, Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Capai 71 Persen secara Nasional*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2024/12/13/15273511/data-terbaru-kpu-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-capai-71-persen-secara

Meleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muliawati, A. (2025). *Partisipasi Pemilih di Pilkada: Pilgub 71,39%, Pilbub 74,41%, Pilwalkot 67,74%*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7761264/partisipasi-pemilih-di-pilkada-pilgub-71-39-pilbup-74-41-pilwalkot-67-74

Newton, K. (1999). Mass Media Effects: Mobilization or Media Malaise. *British Journal of Political Science*, *29*, 577–599.

Putnam, R. D. (1995). *Tuning In , Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America*. *28*(4), 664–683.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Verba, S., Schlozman, kay L., & Brady, H. E. (1995). *Voice And Equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University.

Zulkifli, M. A., Wahdah, N. Al, & Dantye, F. (2025). *Pilkada Kota Pangkalpinang 2024 : Analisis Kritis Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Sosial dan Hukum*. *9*(2), 289–299.